

- Suwardi, Herman. 2003. "Sedikit Komentar terhadap Pemikiran KPU tentang Pendidikan Pemilih" dalam Biro Humas KPU (Ed). 2003. *Voter Education: Pendidikan Pemilih Pemilu 2004*. Jakarta: Komite Pemilihan Umum.
- The Asia Foundation. 2003. "Pemilih Indonesia Tahun 2003, 47% Pemilih tak Tahu Partai yang Dipilih" dalam *Pikiran Rakyat* tanggal 10 Desember 2003. Halaman 1 dan 11.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Bandung: Fokus Media.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik*. Bandung: Fokus Media.

---

\*) **Dra. Diah S. Heryati, M.Si.** adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.

## Disparitas Wilayah Propinsi Jawa Barat Akibat Pemekaran Wilayah Banten

Oleh

Gatiningsih \*)

---

### Abstrak

Pemisahan wilayah Banten dari Propinsi Jawa Barat mengakibatkan perubahan yang signifikan pada sektor ekonomi (industri, perdagangan, listrik) yaitu dengan hilangnya PDRB sebesar 24,45%; serta berkurangnya jumlah penduduk sebanyak 18,49%. Namun demikian dari aspek disparitas wilayah yakni kesenjangan ekonomi antara wilayah Jawa Barat bagian utara, tengah dan selatan yang mencapai indeks 0,3 ternyata tidak mengalami perubahan yang berarti karena pada pasca-pemisahan indeks tersebut hanya meningkat sebesar 0,03. Hal ini berarti selama ini wilayah Banten tidak banyak memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian regional melainkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya sendiri. Akan tetapi hilangnya sektor-sektor ekonomi yang sangat potensial tersebut dalam jangka panjang dapat merugikan Jawa Barat, karena untuk membangun sektor yang sama memerlukan investasi yang sangat besar.

---

### PENDAHULUAN

Wacana pemekaran wilayah Propinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya telah ada sejak era '90-an yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 31

Tahun 1990 tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Namun demikian wacana tersebut baru terlaksana seiring dengan era reformasi dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 serta

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Wilayah.

Propinsi Jawa Barat secara administratif berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta (utara), Propinsi Jawa Tengah (timur), Samudera Indonesia (selatan), dan Selat Sunda (barat).

Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Barat pada 2000 mencapai 43,5 juta jiwa. Pada 1980 baru mencapai 27,4 juta meningkat menjadi 35,3 juta pada 1990, meningkat lagi menjadi 39,2 juta pada 1995, sedangkan pada 1999 berjumlah 42,4 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode (1990 - 2000) adalah 2,17 persen. Karakteristik laju pertumbuhan penduduk di Propinsi Jawa Barat selain dipengaruhi penambahan penduduk alamiah juga faktor migrasi.

Wilayah Propinsi Jawa Barat sebelum pemekaran luasnya 46.229 km<sup>2</sup> meliputi 20 kabupaten dan 8 kotamadya, dengan kepadatan penduduk 2.680 jiwa per kilometer persegi.

#### ERA REFORMASI: PEMISAHAN PROPINSI BANTEN DARI JAWA BARAT

Perkembangan pembangunan di segala sektor yang telah dan sedang dilakukan di Indonesia melalui program jangka menengah maupun jangka panjang tidak lain bertujuan untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dicapai melalui perluasan dan

pemerataan kesempatan kerja, peningkatan ekspor, penghematan devisa, pemanfaatan sumber daya alam, energi dan manusia.

Dalam rangka mempercepat tujuan pembangunan nasional di atas, serta pelaksanaan demokratisasi politik dan ekonomi, pada akhir 2000 Propinsi Jawa Barat dibagi menjadi dua wilayah yaitu Jawa Barat meliputi 16 kabupaten dan 6 kota, dan Propinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten dan kota yang termasuk wilayah yuridiksi Jawa Barat adalah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Bogor, Bandung, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Berikutnya Kota Cirebon, Bekasi, Bandung, Depok, dan Kota Sukabumi.

Wilayah Propinsi Banten terdiri Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak, serta Kota Tangerang, dan Cilegon.

Wilayah Banten mempunyai posisi yang cukup bagus dalam konteks perkembangan ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini secara keseluruhan mencapai 10,68% per tahun pada 1997, melebihi laju pertumbuhan Propinsi Jawa Barat yang mencapai angka 9,07%. Pada 1980 koefisien lokalisasi atau konsentrasi penanaman modal di Banten mencapai 0,6615 untuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan 0,5012 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Lepasnya wilayah Banten dari Propinsi Jawa

Barat pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Jawa Barat mengingat posisi ekonominya yang cukup strategis.

## PROPINSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam lingkup nasional, jumlah penduduk Propinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi, yaitu 42.322.020 jiwa. Secara persentase, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 20,2 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 209.437.010 jiwa.

Rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Barat mencapai 1,73% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk yang secara nasional berada pada urutan kedua dan ketiga. Kepadatan penduduknya yang mencapai 785 jiwa/ km<sup>2</sup> menempatkan Jawa Barat pada urutan keempat setelah DKI Jakarta, Yogyakarta (DIY), dan Jawa Tengah.

Jika dilihat dari salah satu indikator kesejahteraan hidup yaitu angka harapan hidup, Jawa Barat mempunyai angka yang sama dengan rata-rata angka harapan hidup nasional yakni 61,2 tahun. Sementara itu angka tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta (64,5 tahun) dan angka terendah terdapat pada Propinsi Nusa Tenggara Barat (55,78 tahun). Sepintas dapat

dikatakan bahwa kesejahteraan hidup penduduk Jawa barat cukup baik.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat atas dasar harga konstan Rp 60.071.400.000,00, sedangkan PDRB per kapita mencapai Rp 57.178,50. Angka ini berada di bawah PDRB per kapita nasional yang mencapai Rp 344.239,80.

Studi komparatif mengenai tingkat perkembangan propinsi di Indonesia dengan kriteri tertentu yaitu: PDRB, produktivitas, infrastruktur, PMA/PMDN, menunjukkan bahwa Jawa Barat menduduki posisi pertama bersama dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Sumatera Barat.

Dalam konstelasi pembangunan wilayah Jawa Barat, wilayah Banten mempunyai beberapa kota dengan peranan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Tentu saja wilayah ini mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Kontribusi wilayah Banten terhadap PDRB Propinsi Jawa Barat mencapai 24,45%. Oleh karena itu pemisahan Banten dari Jawa Barat mempunyai dampak signifikan bagi Propinsi Jawa Barat, baik dalam konstelasi nasional, regional, maupun lokal.

## Isu Utama

Ketimpangan pembangunan antar-wilayah di Propinsi Jawa Barat terjadi antara Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan. Perkembangan wilayah utara seperti Cilegon, Tangerang dan Cirebon sangat bertolak belakang dengan perkembangan wilayah bagian selatan seperti Ciamis, dan Tasikmalaya. Oleh karena itu akankah lepasnya wilayah Banten berpengaruh terhadap disparitas wilayah sebagaimana diindikasikan selama ini?

## Tujuan Studi

Tujuan studi adalah untuk mengetahui perubahan sosial ekonomi wilayah Propinsi Jawa Barat akibat pemisahan wilayah Banten, khususnya disparitas wilayah, peranan sektor-sektor ekonomi dalam perolehan PDRB, serta beberapa faktor demografi.

## PERUBAHAN ASPEK DEMOGRAFI PROPINSI JAWA BARAT PASCA-PEMISAHAN WILAYAH BANTEN

Mengacu pada tujuan studi ini, wilayah Jawa Barat dikelompokkan

berdasarkan aspek geografi ekonomi dalam tiga bagian berikut.

1. *Wilayah utara*: Kabupaten Serang, Tangerang, Bekasi, Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, serta Kota Cilegon, Tangerang, Bekasi, dan Cirebon.
2. *Wilayah tengah*: Kabupaten Pandeglang, Bogor, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, serta Kota Bogor, Bandung, dan Depok.
3. *Wilayah selatan*: Kabupaten Lebak, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Sukabumi.

## Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk

Dengan lepasnya wilayah Banten dari Jawa Barat, perubahan yang jelas terjadi adalah luas wilayah dan jumlah penduduk, yang selanjutnya akan berpengaruh pada kepadatan penduduk rata-rata dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk sebelum dan setelah pemisahan wilayah Banten di tiga wilayah kajian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Pra dan Pasca Pemisahan Banten

Wilayah	Jumlah Penduduk		Besarnya Perubahan	
	Pra Pemisahan	Pasca	Volume	Persentase
Jabar utara	16.148.016	10.133.498	6.014.51	37,25
Jabar tengah	16.442.663	15.431.992	1.010.79	6,15
Jabar selatan	10.962.293	9.935.191	1.027.10	9,37
Propinsi Jabar	43.553.923	35.500.611	8.052.36	18,49

Sumber: Badan Pusat Statistik 2000 dengan pengolahan

Tabel 2 Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Wilayah	Kepadatan Penduduk		Pertumbuhan Penduduk	
	Pra Pemisahan	Pasca Pemisahan	Pasca Pemisahan	Pasca Pemisahan
Jabar utara	1.397	868	2,41%	1,30%
Jabar tengah	1.185	756	1,87%	1,99%
Jabar selatan	237	206	0,68%	0,59%
Propinsi Jabar	940	610	1,8%	1,43%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2000 dengan pengolahan

Dari tabel 1 terlihat bahwa seluruh wilayah Jawa Barat mengalami penurunan jumlah penduduk sebagai akibat pemisahan wilayah Banten. Penurunan terbesar terjadi pada penduduk Jawa Barat bagian utara, oleh karena di wilayah tersebut sebelum pemisahan banyak terdapat pusat kegiatan, khususnya industri dan perdagangan.

Kabupaten dan Kota Tangerang secara fungsional merupakan salah satu wilayah pembangunan Metropolitan Jakarta, banyak menerima limpahan penduduk yang sebenarnya banyak bekerja di wilayah administrasi Jakarta. Karenanya lepas-nya wilayah ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap jumlah penduduk.

Perubahan selanjutnya terjadi pada kepadatan penduduk Jawa Barat karena luas wilayah propinsi ini berkurang sebesar 8.234,69 km<sup>2</sup>, atau 17,8% dari wilayah Jawa Barat.

Dari tabel 2 terlihat bahwa kepadatan penduduk Jawa Barat rata-rata berkurang dari 940 jiwa/ km<sup>2</sup> menjadi 610 jiwa/ km<sup>2</sup>. Penurunan kepadatan penduduk terbesar terjadi

pada Jawa Barat utara karena sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa Tangerang mempunyai jumlah penduduk yang banyak dengan kepadatan tinggi, karenanya lepasnya Tangerang dari wilayah ini mesti berdampak penting terhadap aspek kependudukan di wilayah Jawa Barat utara.

Fenomena yang sedikit berbeda terjadi pada pertumbuhan penduduk. Di wilayah Jawa Barat utara dan Jawa Barat selatan angka pertumbuhan penduduk mengecil, akan tetapi di Jawa Barat bagian tengah angka pertumbuhan penduduk justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang lepas dari Jawa Barat bagian utara ini mempunyai angka pertumbuhan penduduk yang kecil sehingga ketika wilayah ini tidak dimasukkan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk, angka pertumbuhan penduduk Jawa Barat tengah menjadi bertambah. Pertumbuhan penduduk di ketiga wilayah (utara, tengah, selatan) Jawa Barat tampak pada tabel 2 di atas.

### Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk dalam studi ini dikalkulasi dengan menggunakan formula "geometric rate of growth", atau disebut juga formula bunga berbunga (bunga majemuk) yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk tetap sama dari tahun ke tahun. Formula bunga majemuk tersebut dituliskan sebagai berikut.

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

Di mana :

- $P_n$  = jumlah penduduk pada tahun  $n$   
 $P_o$  = jumlah penduduk pada tahun awal  
 $r$  = angka pertumbuhan penduduk  
 $n$  = jangka waktu perhitungan dalam tahun

Variabel yang diketahui dalam kalkulasi ini adalah sebagai berikut.

- $r$  Jawa Barat utara = 1.30%  
 $r$  Jawa Barat selatan = 0,59%  
 $r$  Jawa Barat tengah = 1,99%  
 $n$  = 5 thn  
 $P_o$  Jawa Barat utara = 10.133.498 jiwa  
 $P_o$  Jawa Barat tengah = 15.431.922 jiwa  
 $P_o$  Jawa Barat selatan = 9.935.191 jiwa

Hasil perhitungan proyeksi ketiga wilayah studi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah.

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa Jawa Barat tengah tetap mempunyai proyeksi jumlah penduduk yang tinggi karena di samping mempunyai jumlah penduduk ( $P_o$ ) yang tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk wilayah ini ( $r$ ) juga memang sudah lebih tinggi dibandingkan dua wilayah yang lain.

**Tabel 3** Proyeksi Penduduk Jawa Barat Pasca Pemisahan Banten

Wilayah	Proyeksi Penduduk Pada Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jabar utara	10.133.498	10.265.233	10.398.682	10.533.864	10.670.805	10.809.525
Jabar tengah	15.431.992	15.740.560	16.055.371	16.376.479	16.704.009	17.038.089
Jabar selatan	9.935.191	9.999.809	10.052.772	10.112.083	10.171.745	10.231.758
Propinsi Jabar	35.500.681	36.139.622	36.790.135	37.790.135	38.126.500	38.812.777

**Sumber:** Badan Pusat Statistik 2000 dengan pengolahan

PERUBAHAN ASPEK EKONOMI PASCA PEMISAHAN WILAYAH BANTEN

**PDRB Jawa Barat**

Dalam bab ini dibahas mengenai struktur perekonomian, *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) tiap wilayah, PDRB per kapita, laju pertumbuhan PDRB, serta dominasi sektor ekonomi yang dilihat dengan menggunakan koefisien "Location Quotion".

PDRB yang digunakan dalam studi ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu PDRB yang penilaiannya berdasarkan harga pada tahun berjalan atau harga yang berlaku pada masing-masing tahun. PDRB di masing-masing wilayah kajian (Jawa Barat utara, tengah, dan selatan) sebelum dan sesudah pemisahan Banten dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4** PDRB Jawa Barat Pra dan Pasca Pemisahan Banten

Wilayah	PDRB (Rp dalam juta)		Besar Perubahan	
	Pra Pemisahan	Pasca Pemisahan	Volume	Prosen-tase
Jabar Utara	99.056.957,95	57.518.420,82	41.538.537,13	41,99%
Jabar Tengah	63.098.452,98	60.424.347,18	2.674.105,80	4,25%
Jabar Selatan	30.448.562,25	27.741.407,25	2.707.055,00	8,89%
Propinsi Jabar	192.603.873.18	145.684.175,25	46.919.697,93	24,45%

**Sumber:** Biro Pusat Statistik 2000, dengan pengolahan

Dari tabel 4 terlihat bahwa penurunan PDRB untuk seluruh Propinsi Jawa Barat cukup besar (24,45%), sedangkan penurunan PDRB per wilayah tertinggi terjadi pada wilayah Jawa Barat utara (41,99%). Hal ini disebabkan bahwa wilayah Banten sangat produktif, sehingga pemisahan wilayah Banten mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat, terutama dilihat dari sudut pandang pendapatan regional (PDRB) Jawa Barat. Dampak ini ternyata juga berpengaruh terhadap PDRB per kapita (lihat tabel 5).

PDRB per kapita Jawa Barat utara terlihat mengalami penurunan cukup berarti, namun demikian angka tersebut tidak sebesar penurunan PDRB yang terlihat mencolok (41,99%). Fenomena ini menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Barat utara sendiri sebelum pemisahan penduduknya cukup besar, sedangkan daerah yang menyumbang PDRB wilayah ini juga cukup terbatas. Sehingga ketika wilayah ini memisahkan diri, penurunan PDRB per kapita tidak sebesar penurunan PDRB-nya. Besar kemungkinan PDRB per kapita di wilayah pemisahan (Banten) menjadi besar.

**Tabel 5** PDRB Per Kapita Jawa Barat Pra dan Pasca Pemisahan Banten

Wilayah	PDRB Per Kapita (Rp)		Besarnya Perubahan	
	Pra Pemisahan	Pasca	Volume	Persentase
Jabar utara	6.134.431	5.676.067	- 456.364	- 7,49%
Jabar tengah	3.837.484	3.915.542	78.058	2,03%
Jabar selatan	2.777.559	2.792.237	14.678	0,53%
Propinsi Jabar	4.170.326	3.794.588	- 375.738	- 9,01%

Sumber: Biro Pusat Statistik 2000, dengan pengolahan

### PDRB Per Sektor Propinsi Jawa Barat

PDRB Propinsi terdiri dari sembilan sektor, kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB dapat dilihat pada tabel 6, dimana terlihat sektor C (industri) memberikan kontribusi terbesar, yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dan pertanian.

**Tabel 6** PDRB Per Sektor Propinsi Jawa Barat

No.	Sektor	Meliputi Bidang	PDRB (juta rupiah)
1	A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	30.730.601,00
2	B	Pertambangan dan Penggalan	10.913.583,00
3	C	Industri Pengolahan	63.685.367,00
4	D	Listrik Gas dan Air Bersih	4.918.894,00
5	E	Bangunan	6.642.944,00
6	F	Perdagangan, Hotel dan Restoran	32.301.728,00
7	G	Pengangkutan dan Komunikasi	10.301.011,00
8	H	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.899.556,00
9	I	Jasa-jasa	16.236.217,00
	Total		181.629.901,00

Sumber: Biro Pusat Statistik 2000

### Penurunan PDRB Per Sektor dari Masing-Masing Wilayah

Dari penghitungan PDRB per sektor di masing-masing wilayah Jawa Barat utara, tengah dan selatan ternyata terdapat penurunan yang sangat signifikan, untuk informasi penurunan PDRB per sektor secara lengkap, dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Persentase Penurunan PDRB Per Sektor

Sektor	Jabar Utara		Jabar Tengah		Jabar Selatan	
	Volume (Rp x 1000)	%	Volume (Rp x 1000)	%	Volume (Rp x 1000)	%
A	245.108.975	24,00	100709827	13,00	1093252	10,48
B	1.396.835	0,17	316122	0,01	22732	0,06
C	2.424.115.156	53,00	29482883	1,19	251121	0,12
D	182.323.567	70,00	1776315	1,04	7987	0,04
E	91.204.143	35,00	10637346	3,68	106459	0,07
F	701.455.336	38,00	71370857	4,83	630838	0,08
G	304.482.209	54,00	15487500	4,71	124990	0,02
H	64.031.203	37,00	9955585	3,86	103015	0,08
I	130.545.727	29,00	27674145	5,29	366661	0,11

Sumber: Biro Pusat Statistik 2000, dengan pengolahan

Berbeda dengan wilayah Jawa Barat bagian tengah dan selatan, penurunan PDRB wilayah Jawa Barat bagian utara adalah yang terbesar. Dari tabel dapat kita lihat bahwa sektor kelistrikan, pengangkutan dan industri turun secara berturut-turut 70%; 54%; dan 53%. Hal ini disebabkan bahwa daerah ini sebelum pemisahan menjadi salah satu pusat kegiatan industri dan perdagangan.

Perubahan PDRB wilayah Jawa Barat bagian tengah sebagaimana kita lihat pada tabel 7 di atas tidak menunjukkan penurunan yang berarti, karena wilayah Banten yang memisahkan diri dari wilayah ini seperti Pandeglang relatif tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Hal yang hampir sama dialami oleh wilayah Jawa Barat bagian selatan, di mana perubahan PDRB akibat pemisahan diri Banten dari Propinsi Jawa Barat tidak terlalu besar.

### Analisa Location Quotion (LQ)

Akibat selanjutnya pemisahan wilayah Banten dari Propinsi Jawa Barat adalah berubahnya peranan kegiatan ekonomi daerah Jawa Barat utara, tengah, dan selatan terhadap Propinsi Jawa Barat. Hal ini terlihat jelas dengan menganalisa "Location Quotion". Teknik analisa LQ pada dasarnya menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah studi dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Secara matematis LQ dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N}$$

Di mana:

$S_i$  = PDRB sektor I di wilayah Jawa Barat (utara, tengah, selatan).

$S$  = PDRB seluruh sektor di wilayah Jawa Barat (utara, tengah, selatan).

$N_i$  = PDRB sektor I di Propinsi Jawa Barat.

$N$  = PDRB seluruh sektor di Propinsi Jawa Barat.

Hasil dari perhitungan LQ untuk wilayah Jawa Barat bagian utara dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

**Tabel 8** Koefisien LQ Per Sektor Pra dan Pasca Pemisahan Banten

Sektor	Jabar Utara		Jabar Tengah		Jabar Selatan	
	Pra	Pasca	Pra	Pasca	Pra	Pasca
A	0,596	0,795	0,70	0,57	2,21	1,72
B	1,314	1,753	0,08	0,66	0,21	1,16
C	1,323	1,764	1,12	0,91	0,21	1,16
D	0,907	1,290	1,00	0,81	0,26	0,20
E	0,713	0,951	1,25	1,01	1,42	0,09
F	1,034	1,379	1,32	1,07	1,44	1,11
G	1,001	1,335	0,92	0,74	1,10	0,85
H	0,539	0,719	1,26	1,02	1,31	1,02
I	0,514	0,685	0,93	0,75	1,33	1,03

**Sumber:** Hasil Pengolahan data

Hasil perhitungan LQ di wilayah Jawa Barat utara menunjukkan bahwa secara keseluruhan LQ pasca pemisahan Banten justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat utara sebelum terjadinya pemisahan cukup dipengaruhi oleh kegiatan sektor yang sama oleh wilayah Banten.

Kenaikan yang cukup berarti terjadi pada sektor ekonomi D (listrik, gas, dan air bersih) karena koefisien LQ yang sebelumnya di bawah 1, setelah pemisahan meningkat menjadi 1,29. Artinya, bahwa sektor ini sekarang menjadi sektor basis yang

mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Jawa Barat utara.

Perhitungan LQ di wilayah Jawa Barat tengah dalam periode yang sama dapat dilihat pada tabel 8 di atas. Dari data tersebut terlihat bahwa seluruh nilai LQ di Jawa Barat tengah mengalami penurunan. Penurunan yang jelas terjadi pada sektor C (industri) dan D (listrik, gas, dan air bersih). Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum terjadi pemisahan Banten, sektor C dan D yang berada di wilayah Banten cukup mempunyai kontribusi yang besar terhadap wilayah Jawa Barat bagian tengah, sehingga

ketika terjadi pemisahan Banten, sektor yang sama tidak lagi mendominasi perekonomian pada wilayah Jabar bagian tengah.

### DISPARITAS WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT PASCA PEMISAHAN WILAYAH BANTEN

Perhitungan disparitas wilayah Propinsi Jawa Barat digunakan index Williamson yang dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut.

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i/n}{Y}}$$

Di mana:

- V<sub>w</sub> = Nilai disparitas
- Y<sub>i</sub> = Pendapatan per kapita sub region
- Y = Pendapatan per kapita keseluruhan region
- N = Penduduk seluruh region
- F<sub>i</sub> = Penduduk sub regional.

Adapun data yang diperoleh di wilayah studi untuk perhitungan index Williamson diuraikan sebagai berikut.

#### Sebelum pemisahan wilayah Banten

Y Jabar utara	= Rp 6.134.431
Y Jabar tengah	= Rp 3.837.484
Y Jabar selatan	= Rp 2.777.559
Y Propinsi Jabar	= Rp 4.170.326
F Jabar utara	= 16.148.016 jiwa
F Jabar tengah	= 16.442.663 jiwa
F Jabar selatan	= 10.962.293 jiwa
N Jawa Barat	= 43.552.923 jiwa

#### Setelah pemisahan wilayah Banten

Y Jabar utara	= Rp 5.676.067
Y Jabar tengah	= Rp 3.915.542
Y Jabar selatan	= Rp 2.792.234
Y Propinsi Jabar	= Rp 3.794.588
F Jabar utara	= 10.133.498 Jiwa
F Jabar tengah	= 15.431.922 Jiwa
F Jabar selatan	= 9.935.191 Jiwa
N Jawa barat	= 35.500.611 Jiwa

Dari perhitungan disparitas di atas didapatkan hasil bahwa index Williamson sebelum pemisahan Banten dari Jawa Barat adalah 0,33; sedangkan setelah pemisahan adalah 0,30. Secara keseluruhan (sebelum dan sesudah pemisahan Banten) index ini adalah kecil ( $0 < V_w < 1$ ), artinya bahwa kesenjangan ekonomi antara wilayah Jawa Barat bagian utara, tengah, dan selatan tidak signifikan untuk dijadikan masalah utama pembangunan ekonomi. Setelah terjadinya pemisahan Banten, ternyata hanya terjadi perbedaan index yang amat kecil, yaitu 0,03. Hal ini mengindikasikan bahwa pemisahan Banten dari Propinsi Jawa Barat tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap perubahan disparitas wilayah.

#### PENUTUP

Dengan adanya pemekaran wilayah Banten, PDRB Propinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 24,45%, namun hal ini tidak terjadi pada PDRB per kapita, hal ini dimungkinkan karena setelah pemisahan Banten dibarengi pula oleh berkurangnya jumlah penduduk di wilayah Jawa Barat yang cukup besar (18,49%), sehingga penurunan PDRB per kapita

propinsi ini tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 9%. Jika dilihat dari sudut pandang disparitas antar-wilayah dalam jangka dekat, penurunan PDRB per kapita di atas memang tidak menjadi ganjalan utama pembangunan ekonomi di propinsi ini, akan tetapi Propinsi Jawa Barat telah kehilangan potensi ekonomi yang besar akibat pemisahan Banten, seperti beberapa sektor ekonomi di Jawa Barat utara (industri - 53%, listrik - 70%, pengangkutan - 54%, dan perdagangan - 38%, dll).

Dampak negatif yang dikawatirkan adalah perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang (jangka panjang) karena kecepatan pertumbuhan penduduk diperkirakan akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan investasi, khususnya untuk menggantikan sektor industri, pengangkutan, perdagangan, listrik, dan lain-lain di wilayah Jawa Barat bagian utara. Jika hal ini terjadi, maka disparitas wilayah di Propinsi Jawa Barat akan terbuka lebar.

Index LQ yang seimbang (meningkat dan menurun) antara wilayah

Jawa Barat bagian utara, tengah dan selatan, harus diinterpretasikan secara hati-hati jika dikaitkan dengan pengembangan ekspor beberapa sektor ekonomi di Propinsi Jawa Barat, karena perubahan LQ tersebut disebabkan oleh perubahan batas wilayah yang banyak bermuatan politis. Perubahan ini tidak serta merta diikuti oleh perubahan orientasi ekonomi, khususnya di bidang usaha. Sebagai contoh adalah bahwa sektor ekonomi yang bergantung pada kegiatan industri di Jawa Barat bagian utara, tidak otomatis berubah ketergantungannya ke daerah tersebut walaupun wilayah Banten tidak lagi menjadi bagian Propinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu untuk menggantikan potensi-potensi yang hilang Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus banyak menciptakan usaha-usaha atau sumber-sumber ekonomi baru dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada saat ini seperti pelabuhan Cirebon dan Indramayu perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menggantikan pelabuhan Merak yang telah lepas.

## KEPUSTAKAAN

- Friedmann, John & Alonso, William. 1964. *Regional Development and Planning, A Reader*. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology.
- Hanafiah, Burhanudin. 1999. *Prioritas Pengembangan Sektor Industri Berdasarkan Keterkaitan Hulu dan Hilir di Propinsi Dati I Jawa Barat*. Bandung: ITB.
- Indonesia. 2000. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999 dan Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang OTDA 2000*. Jakarta : CV.Tamita Utama.
- . 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 129 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*. Jakarta: SETNEG RI

- . 1981. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: LP3ES, FEUI.
- . 2001. *Jawa Barat dalam Angka Tahun 2000*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- . 2001. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Lapangan Usaha*. Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- Sumarsono, Bambang D. 1984. *Identifikasi Sektor-Sektor Kegiatan Usaha yang Memberikan Dampak Positif Terhadap Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Barat*. Bandung: ITB.
- Soerjosejarso, Soelarso B. 1974. *Pengembangan Daerah Potensi Industri di Jawa Barat*. Bandung: ITB.
- Tobing, Tonny Onma Lumban. 1992. *Disparitas Antar-Daerah di Propinsi Lampung*. Bandung: ITB.
- Warpani, Suwardjoko. 1980. *Analisa Kota dan Daerah*. Bandung: ITB.

---

\*) **Dra. Gatningsih**, adalah staf pengajar STPDN, lulusan S-1 UGM dan sekarang sedang mengikuti Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di ITB.